

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH KOREA SELATAN DALAM MENJAGA EKSISTENSI *KOREAN WAVE* SEBAGAI *SOFT POWER* DI TIONGKOK PASCA-PEMBATASAN BUDAYA 2016-2021

Oleh
VIDYA DEVINA PUTRI

Hallyu atau *Korean Wave* telah berkembang menjadi salah satu instrumen *soft power* utama Korea Selatan dalam memperluas pengaruh budayanya di tingkat global, termasuk di Tiongkok. Namun, ketegangan hubungan bilateral pasca-penempatan sistem pertahanan THAAD pada tahun 2016 yang diikuti oleh kebijakan pembatasan budaya (*Hanhanryeong*) oleh Tiongkok menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan daya tarik budaya Korea Selatan dan hambatan politik yang dihadapi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana *soft power* dapat tetap bertahan di tengah tekanan geopolitik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Korea Selatan dalam mempertahankan dan menyesuaikan *soft power* di tengah pembatasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka diplomasi publik dari Nicholas J. Cull yang terdiri dari lima elemen, yaitu *listening*, *advocacy*, *cultural diplomacy*, *exchange diplomacy*, dan *international broadcasting*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data sekunder yang bersumber dari laporan resmi, publikasi lembaga, serta literatur akademik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan budaya pasca-THAAD tidak menghentikan *Hallyu* sebagai instrumen *soft power* Korea Selatan, melainkan mendorong perubahan strategi yang lebih adaptif dan kolaboratif. Melalui kombinasi *listening*, *advocacy*, serta penguatan *cultural diplomacy*, *exchange diplomacy*, dan *international broadcasting*, Korea Selatan tetap mempertahankan konektivitas budaya di Tiongkok. Secara keseluruhan, terjadi pergeseran dari upaya mempertahankan pengaruh (*defending soft power*) menuju penataan ulang strategi global (*rebuilding soft power*) sebagai respons terhadap dinamika geopolitik.

Kata kunci : *Hallyu*, *Soft Power*, Diplomasi Publik, *Hanhanryeong*, Korea Selatan–Tiongkok

ABSTRACT**SOUTH KOREA'S STRATEGY TO SUSTAIN THE KOREAN WAVE AS
SOFT POWER IN CHINA AFTER THE CULTURAL RESTRICTIONS
(2016–2021)****By****VIDYA DEVINA PUTRI**

Hallyu, or the Korean Wave, has evolved into one of South Korea's primary soft power instruments in expanding its cultural influence globally, including in China. However, bilateral relations between the two countries experienced tension following the deployment of the THAAD defense system in 2016, which was followed by China's cultural restriction policy (Hanhanryeong). This situation highlights a gap between South Korea's cultural attractiveness and the political constraints it faces. It raises the question of how soft power can be sustained amid geopolitical pressures. Therefore, this study aims to analyze South Korea's strategies in maintaining and adapting its soft power under such restrictions. This study employs the public diplomacy framework proposed by Nicholas J. Cull, which consists of five elements: listening, advocacy, cultural diplomacy, exchange diplomacy, and international broadcasting. The research adopts a qualitative approach using secondary data analysis from official reports, institutional publications, and relevant academic literature. The findings show that post-THAAD cultural restrictions did not halt Hallyu as a soft power instrument, but instead encouraged a shift toward more adaptive and collaborative strategies. Through a combination of listening, advocacy, and the strengthening of cultural diplomacy, exchange diplomacy, and international broadcasting, South Korea has been able to maintain cultural connectivity in China. Overall, there has been a transition from defending soft power to rebuilding global strategy in response to geopolitical dynamics.

Keywords : Hallyu, Soft Power, Public Diplomacy, Hanhanryeong, South Korea-China